

PERANAN DINAS PENDIDIKAN TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN

Novriasyah Putra¹, Yudhanto Satyagraha Adiputra², Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri³
novriasyahputra@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja
Ali Haji

Abstract

The current condition of dropping out of school children is very worrying, especially in Gunung Kijang District, Bintan Regency where there are still children who drop out of school, even though it has decreased, there are still children who have dropped out of school. The Bintan Regency Government is responsible for ensuring and fulfilling the basic rights of the community to services and improving education to guarantee the rights of every community to receive education, in order to create a quality society that is advanced, independent, and prosperous by building comparative advantages in each region and supported by the capacity of quality human resources (human resources), in accordance with the vision and mission of development in Bintan Regency. In this case the research is focused on the role of the Education Office. This study aims to determine how the Role of the Education Office on Dropout Children in Gunung Kijang District, Bintan Regency. This study aims to determine the role of the Education Office in reducing the number of children dropping out of school in Gunung Kijang District, Bintan Regency. This research uses a qualitative approach, the type of research is descriptive. Data obtained from in-depth interviews with informants, observation and documentation. Data were analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that the efforts or role of the Education Office in reducing the number of children dropping out of school in Gunung Kijang District, Bintan Regency, including issuing policies in the field of education, education funding assistance, providing educational scholarships for the poor, poor student assistance programs (BSM), and socialization to Public. Based on the cases found by the author in the field, the factors that cause children to drop out of school are the children's lack of interest in going to school and the weak family economy.

Keywords: *Role of the Education Office, School Dropout Children*

I. Pendahuluan

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuantujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (Pasal 1 ayat (8) UU nomor 23 Tahun 2014).

Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelola serta

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

meningkatkan potensi yang di miliki daerahnya termasuk Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah yang lebih dekat secara wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, dalam hal ini kebutuhan dasar masyarakat yakni di bidang pendidikan.

Pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awalan “me” sehingga menjadi “mendidik” artinya, memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (Muhibbin Syah, 2010: 10). Pendidikan sebagai salah satu kunci penting dalam proses perkembangan untuk memajukan suatu bangsa dapat dikatakan demikian manakala tingkat pendidikan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya peradaban dan pola pikir masyarakat di Negara tersebut haruslah tinggi pula. Keberhasilan suatu Negara banyak tergantung pada kemajuan tingkat pendidikannya, di Indonesia sendiri banyak dijumpai berbagai masalah yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya saja adalah putus sekolah.

Pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001:15). Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) di antaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dilalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, amanat yang jelas-jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengeyam pendidikan di bangku sekolah.

Tabel 1.1 Jumlah Anak Putus Sekolah di Kecamatan Gunung Kijang 2016-2019

No	Tahun	Jumlah Anak Putus Sekolah
1	2016	61
2	2017	89
3	2018	63
4	2019	42
	Total	255

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2020

Berdasarkan data diatas, angka anak putus sekolah dari tahun 2016-2019 terjadi peningkatan pada tahun 2017 dan penurunan dari tahun 2018 dan 2019. Dari empat tahun tersebut, terdapat 255 anak yang tidak bisa menyelesaikan pendidikannya, maka disini penulis mengambil penelitian pada tahun 2019 dikarenakan jumlah anak putus sekolah pada tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa walaupun masih adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah, tetapi sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun tersebut, kondisi anak putus sekolah untuk anak usia sekolah tentunya sangat memprihatinkan. Yang menjadi fokus penelitian tingkat pendidikan anak putus sekolah yaitu pada tingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) di tahun 2019.

Kondisi anak putus sekolah sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pemerintah Kabupaten Bintan bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan, demi menciptakan masyarakat yang berkualitas maju, mandiri, dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif di masing-masing wilayah dan didukung oleh kapasitas SDM yang berkualitas, sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bintan. Oleh karena itu, bertolak dari latar belakang diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan Dinas Pendidikan terhadap anak putus sekolah di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Pendidikan terhadap anak putus sekolah di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *Interview* (Wawancara), observasi, dan dokumentasi.

1. *Interview* (Wawancara) Menurut Sugiyono (2015) *interview* (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
2. *Observasi* Menurut Sugiyono (2015) *observasi* sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara.
3. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2015) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik dokumentasi ini salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi ini bisa berupa catatan-catatan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang, laporan hasil pelaksanaan maupun laporan tahunan.

III. Hasil dan Pembahasan

Kondisi anak putus sekolah saat ini masih memprihatinkan, walaupun sudah ada penurunan angka anak putus sekolah, tetapi masih juga ada anak yang tidak bisa bersekolah atau berhenti sekolah dikarekan berbagai faktor. Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tetapi masih belum mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan mencatat jumlah sekolah dan jumlah anak putus sekolah dari SD/MI hingga SMP/MTs di Kecamatan Gunung Kijang:

Tabel 2. Sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

No	Sekolah	Jumlah
1	SD/MI	10
2	SMP/MTs	5
	Total	15

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

Tabel 3. Angka Anak Putus Sekolah tingkat SD/MI dan SMP/Mts di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan tahun 2019

No	Sekolah	Jumlah
1	SD/MI	31 Orang
2	SMP/MTs	11 Orang
	Total	42 Orang

Sumber: Olahan Peneliti

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah sekolah dan jumlah anak putus sekolah dari SD/MI hingga SMP/MTs di Kecamatan Gunung Kijang pada tahun 2019 dengan rincian SD/MI total 10

sekolah, SMP/MTs 5 sekolah dan jumlah anak yang putus sekolah pada tahun 2019 yaitu SD/MI 31 orang dan SMP/MTs dengan jumlah 11 orang.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam menangani masalah anak putus sekolah tersebut, yaitu dengan menyalurkan bantuan dari Pemerintah Daerah berupa bantuan dana sekolah pendidikan kemudian juga melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang berada di Kabupaten Bintan dengan melakukan koordinasi kepada tiap-tiap kecamatan untuk melakukan sosialisasi tersebut.

Salah satu kebijakan Dinas Pendidikan dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah yang terjadi adalah gerakan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2018. "Upaya pemerintah dalam memenuhi hak dasar setiap masyarakat pada bidang pendidikan sih banyak, salah satunya yakni penuntasan wajib belajar 9 tahun. Namun, meski pemerintah telah berupaya meringankan kebutuhan masyarakat, jika dari masyarakatnya sendiri yang tidak ada keinginan, hasilnya juga tidak ada. Hal ini disebabkan masih adanya pemikiran masyarakat yang menilai pendidikan itu sangat mahal dan dengan pendidikan tidak menjamin kehidupan yang lebih layak". Kata Bapak Efrion.

Pemerintah dan segenap warganya mesti bertanggung jawab terhadap pembangunan bidang pendidikan khususnya meminimalkan anak putus dan atau tidak sekolah. Jika penuntasan anak putus dan atau tidak sekolah diaktualisasikan menjadi gerakan bersama, maka diharapkan semua elemen dalam masyarakat akan menjadikan anak yang tidak dan atau putus sekolah menjadi tanggung jawab bersama dan menjadikannya sebagai masalah sosial yang harus diselesaikan bersama oleh setiap elemen yang terkait.

Pemerintah Kabupaten Bintan telah berupaya dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bintan. Salah satu indikator paling penting guna peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bintan yakni penganggaran untuk membantu proses peningkatan kualitas terutama disektor pendidikan, dan diharapkan dapat membantu untuk mengurangi beban masyarakat dalam menghadapi masalah biaya pendidikan, sehingga dapat mengatasi anak putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Bintan. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan keterlibatan semua unsur dan elemen masyarakat yang ada.

Selain mengeluarkan kebijakan dan bantuan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan juga gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pembinaan terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta manfaat dari proses pendidikan/bersekolah kepada masyarakat melalui proses sosialisasi.

Kondisi anak yang tidak dan putus sekolah karena perhatian orang tua yang kurang dan faktor budaya dapat di atasi melalui pendekatan tertentu oleh Dinas Pendidikan. Kurangnya perhatian dapat disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua tentang arti penting pendidikan. Begitu juga dengan faktor budaya. Faktor budaya yang dimaksudkan adalah adanya pandangan yang kurang tepat pendidikan yaitu, pendidikan belum tentu menjamin kehidupan yang lebih layak. Sebab, banyak anak-anak tidak memiliki latar belakang pendidikan tetapi dapat hidup layak.

Upaya mengatasi kondisi di atas, selain melakukan pembinaan maka pemerintah melakukan kampanye pendidikan yang telah bekerja sama dengan perangkat pemerintahan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan/Desa berupa sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat dan terkhusus bagi setiap orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi setiap individu dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, Dinas Pendidikan dapat mensosialisasikan kebijakan- kebijakan strategis terutama di bidang pendidikan, seperti subsidi pendidikan gratis, bantuan beasiswa, program penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya

Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak Dinas Pendidikan yang terkait dalam hal ini Kecamatan dengan Dinas Pendidikan menjadi faktor utama dalam mensosialisasikan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun sebagai bentuk pentingnya pendidikan bagi setiap anak untuk peningkatan kualitas masyarakat yang belum merata, terlihat dari masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut.

Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, yaitu kemampuan anak untuk memahami dan mengerti pelajaran yang diberikan tergolong rendah, sehingga mereka lebih memilih berhenti daripada melanjutkan sekolah untuk memahami pelajaran yang diberikan. Kemudian kerajinan diri yang rendah menyebabkan anak sering bolos untuk tidak mengikuti pelajaran yang tidak mereka pahami, karena itu mereka lebih memilih berhenti daripada harus melanjutkan sekolah. Dan mereka lebih memilih untuk bekerja agar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan daripada mereka melanjutkan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

Kemudian, kurangnya perekonomian dari keluarga, menyebabkan anak terpaksa putus sekolah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah untuk anaknya. Dimana ekonomi sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Dengan rendahnya ekonomi tersebut, mereka memilih untuk mencari uang dengan bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga.

IV. Kesimpulan

Adapun temuan yang terdapat pada penelitian ini adalah bantuan yang disalurkan masih belum merata, setiap kecamatan hanya mendapatkan 6 sampai 8 kuota. Walaupun masih ada yang belum mendapatkan bantuan atau masih ada anak yang putus sekolah. Meskipun demikian, penurunan yang terjadi pada anak putus sekolah di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan tersebut sudah cukup baik dalam menangani masalah anak putus sekolah.

Kemudian, setelah bantuan dana tersebut diberikan, ada beberapa masyarakat yang tidak mau melaporkan kepada pihak kecamatan bahwa mereka sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka tanpa bantuan tersebut sehingga masyarakat yang awalnya belum mendapatkan bantuan dana tersebut, akhirnya memilih untuk lebih fokus bekerja daripada menunggu bantuan tersebut, sehingga menyebabkan ekonomi keluarga mereka tidak cukup yang menyebabkan anak mereka tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja.

Untuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu masih belum mencapai sasaran, dimana sosialisasi ini dilakukan hanya di sekolah-sekolah saja, tidak di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga informasi yang disampaikan tidak tepat sasaran yang mana masyarakat yang sibuk bekerja tidak bisa mendapatkan informasi yang disampaikan oleh Dinas tersebut dengan baik.

Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, yaitu kemampuan anak untuk memahami dan mengerti pelajaran yang diberikan tergolong rendah, sehingga mereka lebih memilih berhenti daripada melanjutkan sekolah untuk memahami pelajaran yang diberikan. Kemudian kerajinan diri yang rendah menyebabkan anak sering bolos untuk tidak mengikuti pelajaran yang tidak mereka pahami, karena itu mereka lebih memilih berhenti daripada harus melanjutkan sekolah. Dan mereka lebih memilih untuk bekerja agar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan daripada mereka melanjutkan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

Kemudian, kurangnya perekonomian dari keluarga, menyebabkan anak terpaksa putus sekolah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah untuk anaknya. Dimana ekonomi sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Dengan rendahnya ekonomi tersebut, mereka memilih untuk mencari uang dengan bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga.

V. Daftar Pustaka

Buku:

M. Dalyono. 2010. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rieneka Cipta.

Inu Kencana Syafie. 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Refika Aditama.

- Lexy J. Moleong. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miftah Thoha. 2012. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhibbin Syah. 2010. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ni'matull Huda. 2012. Hukum Pemerintah Daerah. Bandung: Nusamedia.
- Soerjono Soekanto. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Ahmad Rifai. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Putus Sekolah Studi Di Desa Palangiseng Kabupaten Soppeng.
<https://ojs.unm.ac.id/sosialisasi/article/view/2363>. Diakses tanggal 21 Agustus 2020.
- Lennanda Sandhopa. 2019. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Bandung Jaya Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/3436/1/LENNANDA%20SANDHOPA.pdf>. Diakses 21 Agustus 2020.
- Liansyah, Wanto Riva'ie, Rustiyarso. 2014. Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Jenjang Pendidikan SD di Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/6502/6735>. Diakses 21 Agustus 2020.
- Nurul Fajariyah. 2018. Faktor-Faktor Penyebab Remaja Putus Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.
<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/874/1/%20NURUL%20FAJARIYAH%20NPM.%202014115071.pdf>. Diakses tanggal 21 Agustus 2020.
- Yani Talakua. 2018. Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon.
<https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/download/22890/16816>. Diakses tanggal 21 Agustus 2020.
- Ulla Aulia Farsya. 2018. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.umrah.ac.id/1721/1/JURNAL%2520ULLA1%2520%2528pdf.io%2529.pdf&ved=2ahUKEwi8pJW8zsbuAhUayDgGHdzPDqcQFjABegQIBBAJ&usg=AOvVaw2WnNU7F7KB4b_YANCEawfv. Diakses tanggal 30 November 2020.

VI. UcapanTerimakasih

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dai berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, S.IP., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis dalam skripsi ini.
2. Bapak Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP., M.A. Selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing, memberikan masukan dan sarannya kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.

3. Ibu Novi Winarti, S.Pd., M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan saya bimbingan dan pengarahan selama perkuliahan.
4. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu pemerintahan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama perkuliahan dan para Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah membantu kelancaran dalam pengurusan berkas selama perkuliahan.
5. Kepada Almarhum dan Almarhumah kedua orang tua saya, Bapak Muhammad dan Ibu Aisyah yang sudah memberikan saya kehidupan di dunia ini.
6. Kepada kakak-kakak, abang-abang, serta kakak-kakak dan abang-abang ipar saya, Rita Susilawati, Rina Winarni, Budi Julianda, Keri Evriandi, Novriali Hanafi, Abu Bakar, Juwaher, Evi, Juliatmi, dan Mekar Indriani yang telah Memberikan support selama perkuliahan dan Pembelajaran kepada peneliti.
7. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2013 yang telah banyak memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman.
8. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Pemerintah Kecamatan Gunung Kijang, serta masyarakat Gunung Kijang selaku informan yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman kos seperjuangan Jaya Hermawan, Raja Rabuan Zuhdi, Sumarhadi, Zulfikar, Fadli Sahri, Agus Sandra Kirana, Agus Indra Kurniawan, Dadang Kusuma Wijaya, Eric Rinaldi, Febryan Sanada, Muhammad Afis Asraq, Muhammad Fadli, Marwan Purnama, Satria Eka Putra, Aji Sugeng Suratmaji, Jufriyan Efendy, Wak Leng sebagai CEO kedai kopi biss.